JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

PEMILIHAN STRATEGI PENGADAAN KENDARAAN DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH: STUDI ANALISIS NPV DI PEMERINTAH KOTA CILEGON

SELECTION OF OFFICIAL VEHICLE PROCUREMENT STRATEGIES IN REGIONAL GOVERNMENT: AN NPV ANALYSIS STUDY IN THE CILEGON CITY GOVERNMENT

Nanang Sutisna
Bappedalitbang Kota Cilegon, Jl. Buyut Arman No. 01 Kel. Citangkil Kec. Citangkil, 42441
Email: emresutisna@gmail.com

disubmit: 7 Mei 2025, direvisi: 27 Mei 2025, diterima: 2 Juni 2025

ABSTRAK

Pengadaan kendaraan dinas merupakan komponen penting dalam mendukung operasional pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Cilegon menghadapi dilema antara memilih strategi pengadaan melalui pembelian atau sewa kendaraan dinas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi finansial kedua metode tersebut dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan analisis komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kendaraan dinas roda empat di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, dengan sampel berupa kendaraan dinas pejabat eselon II dan kendaraan operasional eselon III. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, regulasi terkait, serta platform jual beli kendaraan *online*. Teknik analisis data menggunakan metode Net Present Value (NPV), dengan menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas selama periode tujuh tahun dan tingkat diskonto sebesar 6,88 persen. Arus kas yang dianalisis mencakup biaya pembelian, pemeliharaan, pajak kendaraan, sewa, bahan bakar, serta estimasi nilai jual kembali kendaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode pembelian memiliki nilai NPV yang lebih rendah secara negatif dibandingkan metode sewa, sehingga lebih efisien untuk kebutuhan jangka panjang. Adapun metode sewa tetap relevan digunakan untuk kebutuhan jangka pendek atau masa transisi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengadaan kendaraan dinas yang optimal dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Kata kunci: *Kota Cilegon, pengadaan kendaraan dinas, Nilai Bersih Sekarang (NPV)*

ABSTRACT

The procurement of official vehicles is a critical component in supporting regional government operations. The Cilegon City Government faces a strategic dilemma in choosing between purchasing or leasing vehicles for official use. This study aims to analyze the financial efficiency of both methods using a quantitative approach. The research design employs a case study and comparative analysis. The population includes all government-owned four-wheeled vehicles in Cilegon, while the samples are selected from echelon II official vehicles and echelon III operational vehicles. The study uses secondary data obtained from local government financial reports, relevant regulations, and online vehicle marketplace platforms. Data analysis is conducted using the Net Present Value (NPV)

Nanang Sutisna (2025). Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 9(1), 29–47.
https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.366

© Penulis | Penerbit: Bappeda Provinsi Banten
Lisensi: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

method by calculating the present value of all cash flows over a seven-year period with a discount rate of 6.88 percent. The cash flow components analyzed include costs of purchase, maintenance, vehicle taxes, leasing, fuel, and estimated resale value. The results indicate that the purchase method yields a less negative NPV than leasing, making it more financially efficient for long-term use. However, leasing remains a relevant option for short-term needs or transitional periods. These findings are expected to serve as a valuable reference for policy decisions regarding official vehicle procurement within the Cilegon City Government.

***Keywords**: Cilegon City, procurement official vehicle, Net Present Value (NPV)*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sudrajat, 2024). Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk kendaraan dinas, menjadi aspek penting yang harus direncanakan secara matang (Rakhman, 2022). Kendaraan dinas memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas pegawai dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (Botutihe, 2018), terutama bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat Per Klasifikasi Usia

Klasifikasi Usia Kendaraan (Tahun)	Jumlah Kendaraan	%
<= 7	125	24,95
> 7	220	43,91
>=15	149	29,74
>=25	7	1,40

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kota Cilegon (2024a)

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Cilegon menghadapi tantangan serius terkait usia dan kondisi kendaraan dinas yang telah menua, yang berdampak langsung terhadap biaya pemeliharaan dan efisiensi pelayanan. Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah Kota Cilegon Tahun 2024, aset kendaraan dinas roda empat Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana pada tabel 1, dari total 501 unit kendaraan, hanya 125 unit (24,95%) yang berusia kurang dari atau sama dengan 7 tahun, sedangkan 220 unit (43,91%) telah melewati usia tersebut tetapi kurang dari 15 tahun. Lebih lanjut, 149 unit (29,74%) telah berusia lebih dari sama dengan 15 tahun dan 7 unit (1,40%) bahkan mencapai usia lebih dari sama dengan 25 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan dinas telah melampaui masa manfaat ekonomisnya dan berpotensi menjadi beban fiskal melalui biaya pemeliharaan dan risiko gangguan operasional.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 81 Tahun 2022, masa manfaat kendaraan dinas roda empat ditetapkan selama 7 tahun. Setelah periode tersebut, kendaraan umumnya memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif, sering

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

mengalami kerusakan, dan berisiko terhadap keselamatan serta efektivitas kerja pegawai (Seniwoliba, 2022).

Merespons situasi tersebut, Pemerintah Kota Cilegon berencana melakukan peremajaan kendaraan dinas secara bertahap mulai tahun anggaran mendatang. Dalam menyusun rencana tersebut, Pemerintah Kota Cilegon dihadapkan pada pilihan strategis: apakah kendaraan dinas sebaiknya diperoleh melalui pembelian langsung atau dengan mekanisme sewa dari pihak ketiga. Keputusan ini harus diambil secara cermat karena berdampak pada pengeluaran daerah dalam jangka panjang, baik dari sisi belanja modal maupun belanja operasional.

Kedua metode pengadaan tersebut memiliki implikasi finansial dan operasional yang berbeda. Pada metode pembelian, kendaraan menjadi milik pemerintah setelah proses pengadaan selesai, dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala biaya pemeliharaan seperti perbaikan, penggantian suku cadang, pembayaran pajak, dan pemeliharaan lainnya. Sebaliknya, dalam metode sewa, kendaraan hanya digunakan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya kepemilikan, dan seluruh biaya operasional serta risiko kerusakan ditanggung oleh pihak penyedia jasa sewa.

Laporan Realisasi Anggaran dalam empat tahun terakhir (2021-2024) menunjukkan bahwa belanja terkait pemeliharaan kendaraan dinas mengalami fluktuasi signifikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. Pada tahun 2021, realisasi pemeliharaan mencapai Rp19,88 miliar, meningkat pada 2022 menjadi Rp21,85 miliar, lalu menurun menjadi Rp19,47 miliar pada 2023 dan Rp17,92 miliar di tahun 2024. Penurunan ini beriringan dengan dimulainya uji coba implementasi sistem sewa kendaraan dinas sejak tahun 2022, dengan anggaran sewa sebesar Rp3,02 miliar, naik menjadi Rp8,63 miliar pada 2023 dan Rp10,51 miliar pada 2024.

Tabel 2
Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan dan Sewa Kendaraan Roda Empat

Tahun	Belanja Pemeliharaan (Miliar)	Belanja Sewa (Miliar)
2021	19,88	0
2022	21,85	3,02
2023	19,47	8,63
2024	17,92	10,51

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kota Cilegon (2022a, 2023, 2024b, 2025)

Secara nominal, terlihat bahwa biaya pemeliharaan menurun sejak sebagian kendaraan dinas disewa. Namun, jika dikombinasikan dengan biaya sewa, total pengeluaran justru menunjukkan peningkatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah strategi sewa benar-

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

benar memberikan efisiensi anggaran atau justru menjadi beban tambahan yang tidak sepadan dengan manfaatnya.

Keputusan antara membeli atau menyewa kendaraan dinas harus diambil berdasarkan kajian menyeluruh yang mencakup analisis biaya manfaat secara kuantitatif dan kualitatif. Salah satu pendekatan kuantitatif yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan keuangan adalah metode *Net Present Value (NPV)* (Lafitri & Herlina, 2022). *NPV* memungkinkan pengambil keputusan untuk mengevaluasi seluruh arus kas keluar selama umur manfaat aset dengan mempertimbangkan nilai waktu uang *(time value of money)*. Dalam hal ini, alternatif dengan nilai NPV terendah dianggap lebih efisien secara ekonomi karena mencerminkan total biaya yang lebih rendah dalam jangka panjang.

Pentingnya evaluasi ini semakin ditekankan oleh fakta bahwa alokasi anggaran pengadaan kendaraan dinas dalam APBD seringkali cukup besar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, biaya pengadaan kendaraan dinas di wilayah Banten untuk kendaraan roda empat bisa mencapai ratusan juta rupiah per unit, di samping biaya pemeliharaan tahunan yang juga signifikan. Sebaliknya, biaya sewa kendaraan dinas pejabat dan kendaraan dinas operasional berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2024 berkisar antara Rp120 juta hingga Rp167 juta per tahun, dengan asumsi pihak penyewa menanggung semua biaya operasional kendaraan kecuali biaya bahan bakar.

Penelitian mengenai analisis kelayakan dan strategi pemilihan metode pengadaan kendaraan telah banyak dilakukan, baik dalam konteks sektor swasta maupun pemerintahan. Dalam sektor swasta, Sondakh dan Ridwan (2022) melakukan analisis kelayakan pembelian kendaraan operasional di PT Pos Logistik Indonesia, dengan menekankan pentingnya perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR),* dan *Payback Period* untuk menilai kelayakan finansial. Amarajaya dkk. (2024) juga menganalisis kelayakan investasi pembelian armada truk trailer pada Distributor Baja X menggunakan metode *NPV*, *Internal Rate of Return, Benefit-Cost Ratio*, dan *Payback Period*, yang menunjukkan hasil investasi yang layak. Dwiputranti dkk. (2024) meneliti kelayakan investasi pembelian kendaraan di PT. SML Bali, juga dengan analisis BOK, *NPV*, dan *IRR*, yang merekomendasikan pembelian kendaraan operasional baru.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam dalam membandingkan metode pengadaan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

kendaraan. Arifin dan Biswan (2020) menyimpulkan bahwa dalam kondisi normal, metode pembelian lebih menguntungkan karena menghasilkan total biaya yang lebih rendah selama masa manfaat kendaraan. Namun, Riris dan Wardhana (2023) menemukan bahwa untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat, sistem sewa dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan pembelian. Sementara itu, Santi dkk. (2020) menegaskan pentingnya analisis nilai uang *(value of money analysis)* termasuk pendekatan *NPV* dalam mengevaluasi keputusan pengadaan kendaraan dinas, dengan membandingkan pembelian, sewa, dan *leasing*.

Windarta dan Amrullah (2020) menyajikan analisis perbandingan biaya antara sewa dan pembelian kendaraan dinas pada satuan kerja pemerintah, dengan temuan bahwa dalam periode 3 tahun, sewa menghasilkan biaya yang lebih rendah, terutama karena efisiensi biaya pemeliharaan dan depresiasi. Safa'at dkk. (2020) juga meneliti pengambilan keputusan antara sewa, beli, dan sewa-beli untuk pengadaan truk perusahaan, dengan analisis *Net Present Value (NPV)* yang menunjukkan bahwa opsi pembelian memberikan nilai *NPV* tertinggi. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam pemilihan metode pengadaan kendaraan, dengan berbagai faktor seperti kondisi operasional, jenis kendaraan, dan perspektif biaya jangka panjang yang perlu dipertimbangkan.

Penelitian ini memperkuat dan memperluas studi-studi sebelumnya dengan menghadirkan konteks lokal yang lebih spesifik, yaitu pada Pemerintah Kota Cilegon, serta memasukkan dua kategori kendaraan sekaligus yaitu kendaraan pejabat eselon II dan kendaraan operasional eselon III, yang dianalisis secara terpisah. Selain itu, studi ini memanfaatkan kombinasi data sekunder yang kaya dan aktual, termasuk harga kendaraan bekas dari *platform* jual beli *online*, serta standar biaya pengadaan dan pemeliharaan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam mengkaji strategi pengadaan kendaraan dinas berbasis kondisi fiskal lokal yang riil, sehingga hasilnya lebih aplikatif untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan pengadaan di tingkat pemerintah daerah.

Dengan latar belakang tersebut, kajian mendalam terhadap metode pengadaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Cilegon menjadi sangat relevan mengingat keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan akan kendaraan dinas yang andal untuk mendukung aktivitas

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas antara opsi sewa dan pembelian dengan menggunakan pendekatan *NPV* selama periode tujuh tahun sebagai masa manfaat kendaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan pengadaan kendaraan dinas yang optimal, baik dari sisi efisiensi biaya maupun keberlanjutan pengelolaan aset daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis dan membandingkan metode pengadaan kendaraan dinas antara pembelian dan sewa di Pemerintah Kota Cilegon. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengukur dan membandingkan nilai finansial dari kedua metode pengadaan menggunakan metode *Net Present Value (NPV),* yang menghasilkan data numerik untuk penarikan kesimpulan yang objektif (Safa'at dkk., 2020; Sondakh & Ridwan, 2022; Sugiyono, 2018).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis komparatif. Studi kasus dipilih untuk mendalami konteks spesifik Pemerintah Kota Cilegon, dengan fokus pada data anggaran dan aset kendaraan dinas, sebagaimana disarankan oleh Yin (2018) bahwa studi kasus cocok digunakan untuk menganalisis fenomena dalam konteks dunia nyata. Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan *NPV* dari metode pembelian dan sewa, sehingga dapat ditentukan metode mana yang lebih efisien secara ekonomi. Metode ini sejalan dengan pandangan Neuman (2014), yang menyebutkan bahwa analisis komparatif bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dua entitas atau strategi dalam kerangka analisis yang sama. Dalam konteks lokal, Sugiyono (2018) juga menegaskan bahwa studi kasus memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap unit sosial tertentu, terutama ketika tujuan penelitian bersifat kontekstual dan aplikatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Cilegon. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Mei 2025.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Laporan Barang Milik Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 (untuk data jumlah dan usia kendaraan dinas)

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2024 (untuk data realisasi belanja pemeliharaan dan sewa kendaraan)
3. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (untuk masa manfaat kendaraan dinas)
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (untuk data standar harga pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas)
5. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (untuk data standar harga sewa kendaraan dinas)
6. Data inflasi *year on year (y-on-y)* Kota Cilegon bulan April tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik (untuk penyesuaian besaran biaya)
7. Data suku bunga pembiayaan kendaraan dari BCA Finance (untuk penentuan tingkat diskonto)
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah (untuk perhitungan pajak kendaraan bermotor)
9. Data harga kendaraan bekas diperoleh berdasarkan harga pasaran yang diambil dari fitur cek harga yang ada pada salah satu *platform* jual beli kendaraan *online* terkemuka yaitu Mobil123.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data-data yang relevan dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi Pemerintah Kota Cilegon dan sumber-sumber lain yang kredibel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data utama yang digunakan adalah *Net Present Value (NPV)*. *NPV* dihitung untuk kedua metode pengadaan (pembelian dan sewa) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Arus Kas: Mengidentifikasi seluruh arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan masing-masing metode pengadaan selama periode analisis (7 tahun, sesuai masa manfaat kendaraan). Arus kas keluar meliputi biaya pembelian kendaraan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan (untuk metode pembelian), dan biaya sewa (untuk metode sewa). Arus kas

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

masuk pada penelitian ini berupa harga kendaraan bekas dengan asumsi kendaraan tersebut dijual kembali pada akhir masa manfaat (untuk metode pembelian).

2. Penentuan Tingkat Diskonto: Menentukan tingkat diskonto yang relevan untuk Pemerintah Kota Cilegon. Tingkat diskonto mencerminkan biaya modal atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi serupa, dan dalam penelitian ini akan menggunakan tingkat suku bunga pembiayaan pembelian kendaraan dari BCA Finance.
3. Perhitungan *Present Value*: Menghitung nilai sekarang *(present value)* dari setiap arus kas dengan mendiskontokannya menggunakan tingkat diskonto yang telah ditentukan. Berikut rumus perhitungan *PV*:

$$PV = \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

Keterangan:

CF_t = Arus kas pada tahun ke-t

r = Tingkat diskonto (6,88%)

t = Tahun ke-t

4. Perhitungan *NPV*: Menghitung *NPV* untuk masing-masing metode dengan menjumlahkan seluruh *present value* arus kas. Berikut rumus perhitungan *NPV*:

$$NPV = \sum PV_t$$

Keterangan:

PV_t = *Present value* pada tahun ke-t

5. Perbandingan *NPV*: Membandingkan nilai *NPV* dari metode pembelian dan sewa. Metode dengan *NPV* terendah dianggap lebih efisien secara finansial.

Definisi Operasional Variabel

Untuk memperoleh kejelasan dalam pengukuran serta mempermudah proses analisis, setiap variabel dalam penelitian ini perlu didefinisikan secara operasional. Berikut adalah definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Pengadaan Kendaraan Dinas: Variabel nominal yang terdiri dari dua kategori, yaitu pembelian dan sewa. Klasifikasi ini sejalan dengan penelitian Arifin dan Biswan (2020), yang menyatakan bahwa metode pengadaan pada instansi pemerintah umumnya terbagi dalam dua pendekatan tersebut, tergantung pada strategi, anggaran, dan kebutuhan pelayanan.
2. Biaya Pembelian: Total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan dinas melalui metode pembelian, termasuk harga kendaraan, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait. Komponen ini merujuk pada rincian yang dijelaskan dalam penelitian (Sondakh & Ridwan, 2022), yang menyebutkan bahwa biaya pembelian tidak hanya mencakup harga kendaraan, tetapi juga pajak, dokumen legalitas, dan biaya awal lainnya.
3. Biaya Sewa: Total biaya yang

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

dikeluarkan untuk menggunakan kendaraan dinas melalui metode sewa selama periode tertentu.

4. Biaya Pemeliharaan: Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kondisi kendaraan dinas tetap baik, termasuk servis, perbaikan, penggantian suku cadang, dan bahan bakar (hanya untuk metode pembelian).
5. Biaya Pajak Kendaraan: Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan dinas (hanya untuk metode pembelian).
6. Harga Pasaran Kendaraan Bekas: Estimasi nilai jual kendaraan dinas pada akhir periode analisis. Harga pasaran kendaraan bekas diperoleh dari fitur cek harga kendaraan bekas yang sejenis di *platform* jual beli *online* Mobil123 (hanya untuk metode pembelian).
7. Tingkat Inflasi: Rata-rata persentase kenaikan harga barang dan jasa di Kota Cilegon selama periode April 2024 sampai dengan April 2025, yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyesuaian biaya tiap tahunnya.
8. Suku Bunga (Tingkat Diskonto): Tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk suatu investasi. Dalam konteks analisis *NPV*, suku bunga digunakan sebagai tingkat diskonto untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai sekarang. Dalam penelitian ini, suku bunga yang digunakan adalah suku bunga pembiayaan pembelian kendaraan dari BCA Finance.
9. *Net Present Value (NPV)*: Selisih antara *present value* arus kas masuk dan *present value* arus kas keluar selama periode analisis, yang menunjukkan nilai bersih dari metode pengadaan kendaraan dinas dalam satuan mata uang.

Teknik Validitas dan Reliabilitas

Teknik-teknik yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Validitas: Validitas data dipastikan dengan menggunakan data dari sumber-sumber resmi dan terpercaya (seperti laporan keuangan pemerintah dan peraturan resmi). Validitas metode analisis (*NPV*) dijamin dengan mengikuti prosedur perhitungan yang telah *established* dalam literatur keuangan (Brigham & Ehrhardt, 2017; Sugiyono, 2018).
2. Reliabilitas: Reliabilitas data dipastikan dengan melakukan pengecekan ulang data dan memastikan konsistensi data dari berbagai sumber. Perhitungan *NPV* juga dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan reliabilitas proses analisis (Ghozali, 2018; Neuman, 2014).

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Pengadaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah diatur dan distandarkan salah satunya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara, termasuk dalam pengadaan kendaraan dinas.

Dalam konteks penelitian ini, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas yang menjadi acuan adalah senilai Rp462.063.000 untuk kendaraan dinas pejabat (Eselon II) dan Rp327.114.000 untuk kendaraan dinas operasional minibus (Eselon III). Satuan biaya ini menjadi dasar dalam perhitungan dan analisis *Net Present Value (NPV)* untuk metode pembelian kendaraan dinas. Penting untuk dicatat bahwa satuan biaya ini mencerminkan harga perolehan kendaraan dan merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan total biaya kepemilikan *(Total Cost of Ownership)* kendaraan dinas.

Perpres 33 Tahun 2020 memberikan batasan dan standar harga yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah dalam pengadaan kendaraan, sehingga diharapkan tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya standar ini, pemerintah dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan kendaraan dinas adalah wajar dan sesuai dengan kebutuhan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Selain biaya pengadaan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas juga merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam analisis biaya kepemilikan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional memberikan acuan terkait standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan dalam penelitian ini adalah senilai Rp38.410.000 per tahun untuk kendaraan dinas pejabat (Eselon II) dan Rp33.410.000 per tahun untuk kendaraan dinas operasional minibus (Eselon III). Biaya pemeliharaan ini, sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2020, mencakup berbagai kegiatan untuk menjaga kondisi kendaraan dinas, termasuk servis rutin, penggantian suku cadang, perbaikan, dan perawatan lainnya. Selain itu, biaya ini juga sudah termasuk biaya bahan bakar kendaraan. Oleh karena itu, dalam analisis biaya metode pembelian, angka ini

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

mencakup estimasi biaya-biaya tersebut selama masa pakai kendaraan.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dinas

Sebagai alternatif terhadap pembelian kendaraan dinas, metode sewa juga menjadi pertimbangan dalam analisis ini. Satuan biaya sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Berdasarkan peraturan tersebut, satuan biaya sewa kendaraan dinas yang relevan dengan penelitian ini adalah Rp13.950.000 per bulan atau Rp167.400.000 per tahun untuk kendaraan dinas pejabat (Eselon II). Sedangkan untuk kendaraan dinas operasional minibus (Eselon III) adalah sebesar Rp10.000.000 per bulan atau Rp 120.000.000 per tahun. Satuan biaya sewa ini sudah termasuk biaya operasional dasar seperti perawatan rutin dan asuransi tetapi tidak termasuk biaya bahan bakar.

Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2024 juga mengatur besaran biaya bahan bakar. Besaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pejabat (Eselon II) adalah sebesar Rp1.250.000 per bulan atau Rp15.000.000 per tahun. Sedangkan untuk kendaraan dinas operasional minibus (Eselon III) adalah sebesar Rp950.000 per bulan atau Rp11.400.000 per tahun.

Data dan Asumsi Yang Digunakan Untuk Perhitungan

Dalam membandingkan biaya antara skema sewa dan pembelian kendaraan dinas dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis kendaraan sebagai sampel untuk estimasi harga jual kembali. Untuk kendaraan dinas pejabat eselon II, digunakan sampel Toyota Kijang Innova Reborn, sementara untuk kendaraan operasional minibus pejabat eselon III digunakan Toyota Rush. Penentuan nilai jual kembali dilakukan dengan merujuk pada harga kendaraan keluaran tahun 2018, dengan asumsi bahwa tahun 2025 merupakan tahun ketujuh atau akhir masa manfaat kendaraan tersebut. Dengan demikian, estimasi harga jual tahun 2025 diharapkan dapat merepresentasikan nilai kendaraan saat mencapai akhir masa manfaat jika pembelian dilakukan pada tahun tersebut.

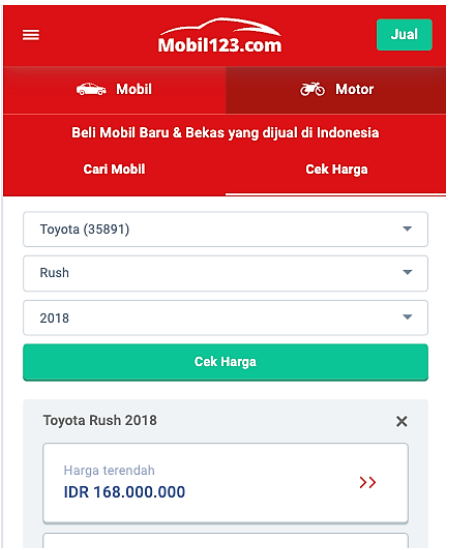
Pemilihan jenis kendaraan tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan jenis kendaraan yang disewa oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2024, yakni Toyota Rush untuk eselon III dan Toyota Innova Zenix untuk eselon II. Namun demikian, karena Toyota Innova Zenix

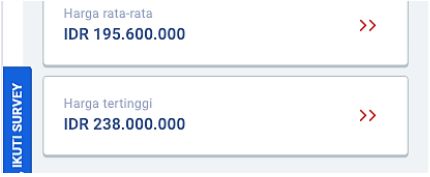
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

belum memiliki data harga kendaraan bekas tahun 2018, maka penulis menggunakan Toyota Kijang Innova Reborn sebagai alternatif. Selain itu, model ini juga masih banyak digunakan oleh kepala OPD eselon II yang belum beralih ke skema sewa, sehingga dinilai representatif untuk keperluan analisis ini.

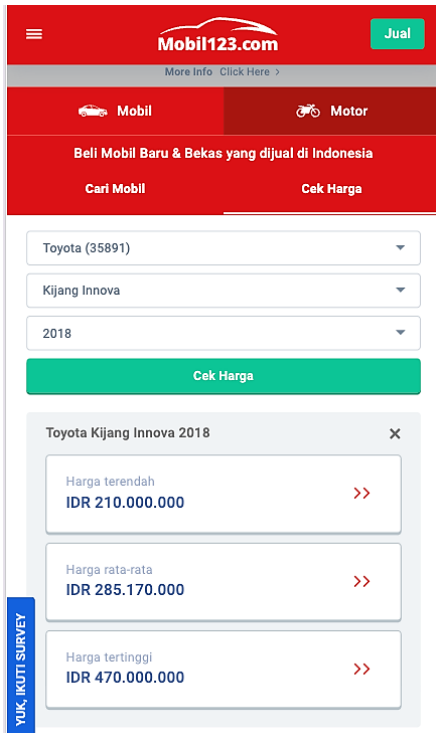
Berdasarkan hasil penelusuran harga melalui platform mobil123, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2, ditemukan bahwa harga terendah untuk Toyota Rush bekas keluaran tahun 2018 adalah sebesar Rp168.000.000. Sementara itu, harga terendah untuk Toyota Kijang Innova Reborn tahun produksi yang sama tercatat sebesar Rp210.000.000.

Perhitungan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 pasal 9 ayat 1.b yang menetapkan tarif pajak sebesar 1% untuk kendaraan milik pemerintah daerah.





Gambar 1. Hasil Cek Harga Toyota Rush Tahun 2018



Gambar 2. Hasil Cek Harga Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2018

Dengan asumsi nilai kendaraan tetap dan tidak mengalami perubahan setiap tahunnya, maka besarnya pajak kendaraan per tahun dapat dihitung sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon II): Rp462.063.000 x 1% = Rp4.620.630.
2. Kendaraan Dinas Operasional Minibus (Eselon III): Rp327.114.000 x 1% = Rp3.271.140.

Pada tanggal 2 Mei 2025, BPS telah merilis data Perkembangan Indeks Harga

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

Konsumen Kota Cilegon April 2025 dengan nilai y-on-y sebesar 1,53%. Sedangkan suku bunga pembiayaan pembelian kendaraan yang tercantum pada laman resmi BCA Finance adalah sebesar 6,88% dengan tenor selama 5 tahun. Tenor ini dipilih dalam analisis karena paling mendekati masa manfaat kendaraan dinas yang umumnya digunakan selama 7 tahun, sehingga dapat merepresentasikan kondisi pembiayaan yang relevan dan realistis.

Data pada tabel 3 merupakan informasi lengkap yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

Identifikasi Arus Kas

Dalam rangka melakukan analisis kelayakan ekonomi terhadap metode pengadaan kendaraan dinas, identifikasi arus kas dilakukan untuk masing-masing skenario, yakni pembelian dan penyewaan kendaraan dinas untuk Pejabat Eselon II dan Operasional Eselon III. Arus kas terdiri dari arus kas keluar yang mencakup biaya pembelian, biaya pemeliharaan, pajak, dan biaya operasional lainnya seperti BBM, serta arus kas masuk berupa nilai jual kembali kendaraan di akhir periode penggunaan.

Tabel 3
Data Penelitian

Jenis Data	Nilai (Rp)
Suku Bunga	6,88%
Inflasi y-on-y April 2025	1,53%
Harga Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon II)	462.063.000
Harga Kendaraan Dinas Operasional (Eselon III)	327.114.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon II)	38.410.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Eselon III)	33.410.000
Pajak Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon II)	4.620.630
Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Eselon III)	3.271.140
Sewa Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon II)	167.400.000
Sewa Kendaraan Dinas Operasional (Eselon III)	120.000.000
BBM Kendaraan Dinas Pejabat (Eselon II)	15.000.000
BBM Kendaraan Dinas Operasional (Eselon III)	11.400.000
Harga bekas Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2018	210.000.000
Harga bekas Toyota Rush Tahun 2018	168.000.000

Sumber: berbagai sumber

Pada skema pembelian kendaraan untuk pejabat eselon II, arus kas keluar terbesar terjadi pada tahun pertama berupa harga beli kendaraan sebesar Rp462.063.000. Setiap tahun terdapat biaya pemeliharaan sebesar Rp38.410.000, dan pajak kendaraan bermotor sebesar 1% dari NJKB (diasumsikan konstan sebesar Rp4.620.630 per tahun). Pada tahun pertama, tidak terdapat biaya pembayaran pajak kendaraan. Pada akhir tahun ketujuh, kendaraan diasumsikan memiliki nilai jual kembali sebesar Rp210.000.000. Ringkasan arus kas skema tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Arus Kas Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Pembelian)

Tahun	Arus Kas	Arus Kas

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

	Keluar (Rp)	Masuk (Rp)
1	500.473.000	0
2	43.030.630	0
3	43.030.630	0
4	43.030.630	0
5	43.030.630	0
6	43.030.630	0
7	43.030.630	210.000.000

Untuk kendaraan operasional eselon III, nilai pembelian awal adalah sebesar Rp327.114.000. Biaya tahunan terdiri atas pemeliharaan sebesar Rp33.410.000, dan pajak tahunan sebesar Rp3.271.140. Untuk pajak kendaraan, sama seperti asumsi sebelumnya bahwa tahun pertama tidak ada biaya pajak kendaraan. Nilai jual kendaraan pada akhir tahun ketujuh diasumsikan sebesar Rp168.000.000. Rincian arus kas untuk skema tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Dalam skema penyewaan kendaraan pejabat eselon II, arus kas keluar dihitung berdasarkan biaya sewa tahunan yang diasumsikan mengalami kenaikan karena

Tabel 5
Arus Kas Kendaraan Dinas Operasional Eselon III (Pembelian)

Tahun	Arus Kas Keluar (Rp)	Arus Kas Masuk (Rp)
1	360.524.000	0
2	36.681.140	0
3	36.681.140	0
4	36.681.140	0
5	36.681.140	0
6	36.681.140	0
7	36.681.140	168.000.000

inflasi 1,53% per tahun. Asumsi ini mengacu pada pendekatan yang digunakan

Tabel 6
Arus Kas Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Sewa)

Tahun	Arus Kas Keluar (Rp)
1	182.400.000
2	184.961.220
3	187.561.627
4	190.201.820
5	192.882.407
6	195.604.008
7	198.367.250

dalam penelitian Windarta dan Amrullah (2020), yang juga menggunakan penyesuaian inflasi dalam perhitungan skema sewa kendaraan dinas. Selain itu, ditambahkan biaya operasional tetap berupa BBM sebesar Rp15.000.000 per tahun. Total arus kas keluar untuk masing-masing tahun pada skema ini dapat dilihat pada tabel 6.

Untuk kendaraan operasional eselon III, biaya sewa tahunan juga diasumsikan mengalami kenaikan mengikuti inflasi 1,53%, dengan tambahan biaya BBM sebesar Rp11.400.000 per tahun. Total arus kas keluar per tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Arus Kas Kendaraan Dinas Operasional Eselon III (Sewa)

Tahun	Arus Kas Keluar (Rp)
1	182.400.000
2	184.961.220
3	187.561.627
4	190.201.820
5	192.882.407
6	195.604.008
7	198.367.250

Penentuan Tingkat Diskonto

Tingkat diskonto digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima atau dikeluarkan di masa mendatang. Dalam analisis ini,

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

tingkat diskonto ditetapkan sebesar 6,88%. Nilai ini merepresentasikan estimasi tingkat pengembalian minimal yang diharapkan oleh pemerintah terhadap investasi kendaraan dinas, serta memperhitungkan unsur risiko dan biaya kesempatan modal.

Perhitungan *Present Value* dan *Net Present Value*

Setelah tingkat diskonto ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung *Present Value (PV)* dari setiap arus kas yang terjadi selama masa analisis. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui nilai sekarang dari setiap arus kas di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat diskonto yang telah ditetapkan. Dengan demikian, nilai-nilai yang diperoleh akan merefleksikan nilai riil yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi. Tabel 8, 9, 10, dan tabel 11 menunjukkan hasil perhitungan tersebut.

Tabel 8
Perhitungan *NPV* Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Pembelian)

Tahun	Faktor Diskon-to	*PV*	*NPV*
1	0,9356	(468.242.539)	(468.242.539)
2	0,8754	(37.669.014)	(505.911.552)
3	0,8191	(35.246.389)	(541.157.941)
4	0,7663	(32.974.372)	(574.132.313)
5	0,717	(30.852.962)	(604.985.275)
6	0,6708	(28.864.947)	(633.850.221)
7	0,6277	104.806.674	(529.043.548)

Tabel 9
Perhitungan *NPV* Kendaraan Dinas Operasional Eselon III (Pembelian)

Tahun	Faktor Diskonto	*PV*	*NPV*
1	0,9356	(337.306.254)	(337.306.254)
2	0,8754	(32.110.670)	(369.416.924)
3	0,8191	(30.045.522)	(399.462.446)
4	0,7663	(28.108.758)	(427.571.204)
5	0,717	(26.300.377)	(453.871.581)
6	0,6708	(24.605.709)	(478.477.290)
7	0,6277	82.428.848	(396.048.441)

Tabel 10
Perhitungan *NPV* Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Sewa)

Tahun	Faktor Diskonto	*PV*	*NPV*
1	0,9356	(170.653.440)	(170.653.440)
2	0,8754	(161.915.052)	(332.568.492)
3	0,8191	(153.631.728)	(486.200.220)
4	0,7663	(145.751.654)	(631.951.875)
5	0,717	(138.296.686)	(770.248.561)
6	0,6708	(131.211.169)	(901.459.730)
7	0,6277	(124.515.123)	(1.025.974.852)

Tabel 11
Perhitungan *NPV* Kendaraan Dinas Operasional Eselon III (Sewa)

Tahun	Faktor Diskonto	*PV*	*NPV*
1	0,9356	(170.653.440)	(170.653.440)
2	0,8754	(161.915.052)	(332.568.492)
3	0,8191	(153.631.728)	(486.200.220)
4	0,7663	(145.751.654)	(631.951.875)
5	0,717	(138.296.686)	(770.248.561)
6	0,6708	(131.211.169)	(901.459.730)
7	0,6277	(124.515.123)	(1.025.974.852)

Perbandingan *NPV*

Setelah dilakukan perhitungan Net Present Value (NPV) terhadap skenario pembelian dan penyewaan kendaraan dinas, diperoleh gambaran mengenai efisiensi biaya jangka panjang dari masing-masing metode pengadaan. Perhitungan ini dilakukan untuk dua jenis kendaraan dinas, yaitu untuk Pejabat Eselon II dan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

kendaraan Operasional Eselon III, dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 6,88% dan horizon waktu 7 tahun.

NPV dihitung berdasarkan seluruh arus kas aktual yang timbul selama masa penggunaan kendaraan, termasuk biaya pembelian (untuk skema pembelian), biaya pemeliharaan, pajak kendaraan, bahan bakar, serta nilai sisa (untuk skema beli) atau biaya sewa tahunan (untuk skema sewa). Semua arus kas tersebut dikonversikan ke nilai saat ini untuk mendapatkan total biaya riil dari masing-masing alternatif. Hasil perhitungan *NPV* keempat skenario dirangkum pada tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12
Ringkasan Hasil Perhitungan *NPV*

Alternatif	Total *NPV* (Rp)
Pembelian Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	(529.043.548)
Pembelian Kendaraan Dinas Operasional Eselon III	(396.048.441)
Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	(1.025.974.852)
Sewa Kendaraan Dinas Operasional Eselon III	(738.969.031)

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, metode pembelian kendaraan dinas lebih efisien secara ekonomi dibandingkan metode sewa jika dianalisis dalam horizon waktu 7 tahun. Selisih total *NPV* untuk kendaraan pejabat eselon II antara pembelian dan sewa mencapai sekitar Rp496 juta, sementara untuk kendaraan operasional eselon III, selisihnya mencapai Rp343 juta.

Namun demikian, jika dilihat secara tahunan dan dalam horizon jangka pendek (1–3 tahun), metode sewa dapat menjadi lebih layak, terutama karena:

1. Tidak memerlukan investasi awal yang besar.
2. Memberikan fleksibilitas anggaran dalam masa ketidakpastian fiskal.
3. Cocok untuk kebutuhan kendaraan yang bersifat sementara atau dinamis.

Dengan kata lain, skema sewa tetap dapat menjadi strategi yang masuk akal untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan pembelian lebih menguntungkan untuk penggunaan jangka panjang, sesuai masa manfaat kendaraan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Windarta dan Amrullah (2020), yang juga membandingkan efisiensi antara pembelian dan sewa kendaraan dinas menggunakan pendekatan *NPV*. Mereka menemukan bahwa meskipun sewa cenderung lebih ringan pada tahun-tahun awal (1-3 tahun) karena tidak memerlukan investasi besar, dalam jangka panjang pembelian lebih menguntungkan karena adanya nilai sisa kendaraan dan akumulasi biaya sewa yang lebih tinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan permasalahan, hasil dan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pembelian kendaraan dinas lebih menguntungkan secara finansial dibandingkan metode sewa dalam jangka panjang, baik untuk kendaraan Pejabat Eselon II maupun kendaraan operasional Eselon III.
2. Total NPV dari pembelian kendaraan pejabat eselon II adalah -Rp529 juta, sementara NPV dari sewa sebesar -Rp1,025 miliar, menghasilkan selisih efisiensi biaya sekitar Rp496 juta.
3. Untuk kendaraan operasional eselon III, pembelian menghasilkan NPV -Rp396 juta, lebih baik dibandingkan sewa dengan NPV -Rp739 juta, dengan penghematan sekitar Rp343 juta.
4. Meskipun demikian, dalam jangka pendek (1 – 3 tahun), metode sewa dapat menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan layak, terutama ketika anggaran pembelian belum tersedia atau kebutuhan kendaraan bersifat sementara.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil analisis dan perhitungan *Net Present Value (NPV)* yang telah dilakukan, maka rekomendasi kebijakan berikut disusun sebagai implikasi praktis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam menentukan strategi pengadaan kendaraan dinas yang optimal:

1. Pemerintah Kota Cilegon disarankan untuk menggunakan strategi pembelian dalam pengadaan kendaraan dinas, khususnya jika kendaraan akan digunakan secara penuh selama masa manfaat (7 tahun) dan tersedia anggaran belanja modal.
2. Strategi sewa dapat dipertimbangkan dalam situasi tertentu, seperti kebutuhan kendaraan jangka pendek, keterbatasan fiskal, atau untuk dinas yang memiliki intensitas penggunaan kendaraan yang tinggi namun fluktuatif.
3. Sewa kendaraan juga direkomendasikan untuk keperluan transisi, misalnya saat kendaraan dinas lama sudah dilelang dan proses pengadaan kendaraan baru masih berlangsung. Dengan demikian, kelangsungan operasional perangkat daerah tetap dapat terjamin tanpa mengganggu pelayanan publik.
4. Untuk meningkatkan efisiensi pengadaan, pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap aset kendaraan, termasuk usia, biaya perawatan, dan nilai jual, guna memastikan bahwa strategi pengadaan tetap relevan dengan kondisi operasional yang berubah.
5. Sebagai bagian dari perencanaan anggaran jangka menengah, kajian kelayakan finansial berbasis NPV perlu

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

dijadikan instrumen standar dalam menentukan skema pengadaan barang milik daerah, agar setiap keputusan berbasis pada pertimbangan nilai manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Amarajaya, D., Iskandar, Y. A., & Vikaliana, R. (2024). Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Armada Trailer Truck pada Distributor Baja X. *IKRAITH-EKONOMIKA*, *7*(2), 153–165. https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i2

Arifin, Z., & Biswan, A. T. (2020). Pengambilan Keputusan Manajerial: Opsi sewa atau beli dalam pengadaan kendaraan dinas. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *5*(1), 17–29. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.169

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Cilegon April 2025*. Diambil dari https://cilegonkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/02/184/perkembangan-indeks-harga-konsumen-kota-cilegon-april-2025.html

BCA Finance. (2025). KKB Pembelian Solusi terbaik untuk pembiayaan mobil baru ataupun bekas. Diambil 7 April 2025, dari https://www.bca.co.id/id/individu/produk/pinjaman/kkb/kkb-finance

Botutihe, N. (2018). Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. *Publik Jurnal Ilmu Administrasi*, *6*(2), 79–86.

Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial Management: Theory and Practice* (15 ed.). Cengage Learning.

Dwiputranti, M. I., Putri, I. G. A. P. T., & Amalia, N. (2024). Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Kendaraan dan Strategi Pengembangan Usaha Di PT. SML Bali. *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan*, *13*(3), 300–309.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lafitri, E., & Herlina. (2022). Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Armada Truck Pada UD. Restu Ami. *Integrasi jurnal Ilmiah Teknik Industri*, *7*(2). Diambil dari http://jurnal.um-palembang.ac.id/integrasi/index

Mobil123. (2025). Cek Harga Mobil. Diambil 7 Mei 2025, dari https://www.mobil123.com/

Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches* (7 ed.). Pearson.

Pemerintah Kota Cilegon. (2022a). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 (Audited)*.

Pemerintah Kota Cilegon. (2022b). *Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*.

Pemerintah Kota Cilegon. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 (Audited)*.

Pemerintah Kota Cilegon. (2024a). *Laporan Barang Milik Daerah Kota Cilegon Tahun 2024*. Cilegon.

Pemerintah Kota Cilegon. (2024b). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 (Audited)*.

Pemerintah Kota Cilegon. *Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon*. , Pub. L. No. 54 (2024). Indonesia.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 29–47
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.366

Pemerintah Kota Cilegon. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 (Unaudited)*.

Pemerintah Provinsi Banten. *Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah*. , Pub. L. No. 12 (2021).

Rakhman, A. A. (2022). Pengembangan Konsep Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, *1*(1), 40–52. https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.12

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional*. , Pub. L. No. 33 (2020). Indonesia.

Riris, R., & Wardhana, A. K. (2023). Analisis Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Melalui Sistem Pembelian. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *3*(3), 416–422. https://doi.org/10.47233/jebs.v3i3.1184

Safa'at, Fatimah, N., & Kartikaningsih, D. (2020). Analysis Of Rent, Buy And Rent-To-Buy With Net Present Value Method In The Decision Of Truck Procurement At PT. XYZ. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, *2*(1), 53–65.

Santi, E., Wirahadi, A., Wahyu Saputra, A., Mustika, R., & Ferdawati. (2020). Analisis Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa (Studi Pada Politeknik Negeri Padang). *Akuntansi dan Manajemen*, *15*(1), 91–101. https://doi.org/10.30630/jam.v15i1.60

Seniwoliba, J. A. (2022). Asessment of Vehicle Maintenance Culture and Its Cost Effectiveness: Case of University for Development Studies. *European Scientific Journal ESJ*, *10*, 300–322. https://doi.org/10.19044/esipreprint.10.2022.p300

Sondakh, E., & Ridwan, R. F. (2022). Analisis Kelayakan Pembelian Kendaraan Operasional di PT Pos Logistik Head Office Jakarta. *Jurnal Logistik Bisnis*, *12*(02), 21–24. Diambil dari https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/logistik/

Sudrajat, Y. (2024). Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(2), 1954–1965. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2169

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (3 ed.). Bandung: Alfabeta.

Windarta, W. R., & Amrullah, M. (2020). Biaya Termurah Pengadaan Kendaraan Dinas Satuan Kerja Pemerintah: Sewa Atau Beli. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, *2*(1), 1–22. Diambil dari https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/513

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6 ed.). SAGE Publications.